



Analisis Peran Bagian Humas dalam Meningkatkan Informasi kepada Masyarakat pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Analysis of the role of the Public Relations section in increasing information to the public at the Secretariat of the DPRD of North Sumatra Province

Restraint just skb Baen, Walid Mustafa Sembiring* & Beltahmamero Simamora

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Transparansi dan aksesibilitas informasi dalam pemerintahan daerah sangat penting bagi masyarakat. Bagian Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara memegang peran krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat dan menjaga citra lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami peran Bagian Humas dalam memperluas akses informasi publik. Hasilnya menunjukkan bahwa Bagian Humas berperan sebagai jembatan komunikasi antara DPRD dan masyarakat. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas, serta faktor-faktor eksternal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu adanya upaya serius dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Humas, alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kerjasama dengan media massa, dan pembangunan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang Bagian Humas DPRD Sumatera Utara serta solusi yang dapat diimplementasikan.

Kata kunci: Humas DPRD Sumatera Utara; Akses Informasi Publik; Transparansi Pemerintah Daerah

Abstract

Transparency and accessibility of information in local government is very important for the community. The Public Relations Section of the North Sumatra Provincial DPRD plays a crucial role in conveying accurate information and maintaining the image of the institution. This research uses a qualitative approach to understand the role of the Public Relations Section in expanding access to public information. The results show that the Public Relations Section acts as a communication bridge between the DPRD and the community. However, there are several obstacles such as limited human resources, limited facilities and infrastructure, and external factors. To overcome these obstacles, serious efforts are needed to improve the skills and knowledge of Public Relations, adequate budget allocation, increasing cooperation with the mass media, and building better relations with the community. Thus, this research provides a better understanding of the challenges and opportunities of the Public Relations Section of the North Sumatra DPRD and solutions that can be implemented.

Keywords: *Public Relations of North Sumatra DPRD; Access to Public Information; Local Government Transparency*

How to Cite: Baen, R.J.S., Sembiring, W.M. & Simamora, B. (2024) Analisis Peran Bagian Humas Dalam Meningkatkan Informasi Kepada Masyarakat Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(1) 2024: 92-98



PENDAHULUAN

Dalam konteks pemerintahan daerah, transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam membangun kepercayaan dan partisipasi publik yang kuat. Transparansi memastikan bahwa keputusan dan kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat, memungkinkan mereka untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dengan lebih efektif (Kurniaty, 2020; Rahayu et al., 2023). Aksesibilitas informasi juga memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, transparansi dan aksesibilitas informasi merupakan fondasi yang penting bagi pemerintahan yang demokratis dan akuntabel di tingkat local (Aruan et al., 2023; Husnifal et al., 2023; Jatikusuma & Hartono, 2023; Matondang et al., 2023).

Keterbukaan dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat juga merupakan instrumen penting dalam memperkuat tanggung jawab dan kinerja pemerintah daerah. Dengan memungkinkan akses yang mudah terhadap informasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas mereka kepada publik. Dalam lingkungan yang transparan, pemerintah daerah dihadapkan pada tekanan untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka, yang mendorong mereka untuk bekerja lebih efisien dan efektif (Jannah et al., 2022; Sianturi et al., 2022). Selain itu, dengan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah daerah dapat memperoleh masukan berharga dari berbagai perspektif, yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan secara adil. Dengan demikian, transparansi dan aksesibilitas informasi bukan hanya menjadi prinsip yang penting dalam pemerintahan daerah, tetapi juga alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan pelayanan publik. (Dea et al., 2022).

Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki peran strategis dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya peran Bagian Humas dalam meningkatkan informasi kepada masyarakat menjadi sebuah hal yang tidak bisa diabaikan (Sumiati et al., 2021).

Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang memiliki kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik yang tinggi, menuntut kebutuhan akan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh Masyarakat (Nababan et al., 2018). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Bagian Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugasnya.

Pertama, perubahan tren dan pola komunikasi masyarakat modern yang semakin dinamis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak signifikan terhadap cara masyarakat memperoleh informasi (Hutapea, 2022). Masyarakat modern cenderung lebih memilih untuk mendapatkan informasi secara cepat dan langsung melalui media sosial atau internet (Pramaskara, 2022). Oleh karena itu, Bagian Humas DPRD perlu untuk terus beradaptasi dengan perubahan ini dan menggunakan media-media yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kedua, kompleksitas isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Sumatera Utara. Provinsi ini memiliki beragam masalah, mulai dari masalah ekonomi, sosial, hingga politik yang membutuhkan pemahaman yang mendalam serta penanganan yang tepat dari pihak-pihak terkait (Azhara & Kartini, 2022). Bagian Humas DPRD perlu memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi secara tepat dan akurat mengenai isu-isu tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami dan ikut berpartisipasi dalam penyelesaian masalah yang ada.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas lembaga publik yang semakin diperketat (Hia et al., 2021). Masyarakat Sumatera Utara memiliki hak untuk mengetahui segala kegiatan dan keputusan yang diambil oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, Bagian Humas DPRD perlu untuk memastikan bahwa informasi-informasi terkait kegiatan dan keputusan DPRD disampaikan secara transparan kepada masyarakat agar tercipta kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang lebih besar (Juru & Gorda, 2021).

Keempat, tantangan dalam mengelola citra dan reputasi DPRD Provinsi Sumatera Utara (Syahputra et al., 2019). Citra dan reputasi merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah

lembaga, termasuk DPRD. Bagian Humas perlu untuk dapat menjaga citra dan reputasi DPRD melalui penyampaian informasi yang jujur, akurat, dan mengedepankan nilai-nilai etika serta integritas dalam setiap kegiatan komunikasi dengan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, peran Bagian Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara menjadi sangat krusial. Bagian Humas tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi antara DPRD dengan Masyarakat (Hidayat et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai peran Bagian Humas dalam meningkatkan informasi kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara guna memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Bagian Humas tersebut.

Dalam konteks pemerintahan daerah, transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat menjadi hal yang krusial (Manik et al., 2022). Di Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan jelas kepada publik. Dalam konteks ini, Bagian Humas DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Provinsi Sumatera Utara memiliki kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik yang tinggi, sehingga membutuhkan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, Bagian Humas DPRD Sumatera Utara menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, peran Bagian Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara menjadi sangat penting. Bagian Humas bukan hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara DPRD dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai peran Bagian Humas dalam meningkatkan informasi kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara untuk memahami tantangan dan peluang yang ada serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas kinerja Bagian Humas tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran Bagian Humas dalam memperluas akses informasi publik di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan kualitatif digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi subjektif dari responden terkait dengan topik penelitian (Bah et al., 2020).

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang dan fenomena yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk memahami peran Bagian Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara pada bulan Februari 2022. Pendekatan penelitian ini mengacu pada metodologi yang diuraikan oleh Sugiyono (2010), yang menyatakan bahwa penelitian adalah suatu metode untuk mengembangkan atau memvalidasi produk pendidikan, dalam hal ini produk informasi yang disampaikan oleh Bagian Humas DPRD.

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan inferensi data. Sumber informasi utama yang diwawancarai adalah M. Sofyan Tanjung, S.Sos, Ibu Nurul Fajar Samosir, SE, Bapak Affan M. Ritonga, ST, dan Bapak Muhammad Roihan, SE, sementara Bapak T. Abdul Gafur, S.Sos, dan Ibu Ayuni Nadiyah Nasution, SE, berperan sebagai sumber informasi tambahan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan para informan utama dan observasi terhadap praktik-praktik yang dilakukan oleh Bagian Humas. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendukung pemahaman lebih lanjut tentang konteks dan peran Bagian Humas dalam konteks DPRD Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Humas pada Sekretariat DPRD Sumatera Utara

Peran Humas (Hubungan Masyarakat) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara merupakan elemen yang sangat penting dalam menjaga keterbukaan dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. DPRD Provinsi Sumatera Utara, sebagai lembaga perwakilan rakyat, memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, Bagian Humas memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara DPRD dan masyarakat, serta sebagai penggerak dalam memperluas pemahaman dan partisipasi publik terhadap proses dan keputusan yang diambil oleh DPRD.

Peran Humas tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan pengelolaan citra dan reputasi lembaga, serta memfasilitasi dialog dan interaksi yang konstruktif antara DPRD dan masyarakat. Dalam paragraf pendahuluan ini, kami akan menjelaskan peran yang dimainkan oleh Bagian Humas dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan di Sekretariat DPRD Sumatera Utara.

Humas (Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat DPRD Sumatera Utara memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan yang baik antara DPRD dengan publiknya, baik itu secara internal maupun eksternal. Salah satu peran utamanya adalah dalam bidang komunikasi dan informasi. Humas DPRD Sumatera Utara bertugas untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan, program, dan kebijakan DPRD kepada publik melalui berbagai media, seperti website, media sosial, publikasi, dan siaran pers. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk merespon pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait kinerja DPRD melalui berbagai saluran komunikasi, seperti telepon, email, media sosial, dan kotak saran. Pengelolaan akun media sosial resmi DPRD juga merupakan tanggung jawab Humas untuk menyebarkan informasi, berita, dan update terbaru kepada publik. Tak hanya itu, Humas juga aktif menyelenggarakan berbagai acara seperti seminar, workshop, dan audiensi untuk menjalin komunikasi dan interaksi dengan publik.

Selanjutnya, peran Humas DPRD Sumatera Utara juga terkait dengan membangun citra positif lembaga. Mereka bertugas mempromosikan citra positif DPRD sebagai lembaga yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saat terjadi krisis atau isu negatif, Humas menjadi juru bicara DPRD yang menangani hal tersebut dan menjaga reputasi lembaga. Selain itu, mereka menjalin hubungan baik dengan media massa untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang DPRD.

Humas DPRD Sumatera Utara juga memiliki peran dalam edukasi dan partisipasi masyarakat. Mereka melakukan edukasi kepada masyarakat tentang fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan DPRD melalui berbagai kegiatan sosialisasi, hearing, dan reses. Humas juga bertindak sebagai jembatan komunikasi antara DPRD dengan konstituennya, memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat didengar dan direspons oleh DPRD.

Humas DPRD Sumatera Utara juga terlibat dalam membangun hubungan internal. Mereka bertugas membangun hubungan yang harmonis antara anggota DPRD, staf, dan pimpinan Sekretariat DPRD, serta menyediakan informasi dan layanan kepada mereka. Selain itu, Humas juga membantu meningkatkan kinerja internal Sekretariat DPRD dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan SDM. Dengan demikian, peran Humas pada Sekretariat DPRD Sumatera Utara tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi kepada publik, tetapi juga meliputi berbagai aspek dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan internal lembaga tersebut.

Faktor-Faktor yang Menghambat Kemampuan Humas dalam Mengkomunikasikan Informasi Bagian Humas DPRD Sumut

Berbagai faktor dapat menghambat kemampuan Bagian Humas dalam mengkomunikasikan informasi di DPRD Sumatera Utara. Pertama-tama, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor yang mempengaruhi. Kurangnya keterampilan komunikasi yang efektif, seperti menulis, berbicara di depan publik, dan public speaking, dapat menjadi hambatan bagi Humas dalam menyampaikan informasi kepada publik secara jelas dan persuasif. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang tugas dan fungsi DPRD, program kerja, dan kebijakan yang sedang dibahas juga dapat membuat Humas kesulitan dalam menjawab pertanyaan publik dengan komprehensif.

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang menghambat (Irfan & M. tahir, 2020). Anggaran yang terbatas dapat menghambat Humas dalam melakukan kegiatan komunikasi, seperti mengadakan acara, mencetak publikasi, dan mengelola media sosial. Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi, seperti website yang outdated, akun media sosial yang tidak aktif, dan peralatan audio-visual yang tidak memadai, juga dapat menghambat Humas dalam menyebarkan informasi secara efektif. Selanjutnya, kurangnya akses informasi dari internal DPRD, seperti dokumen rapat, hasil keputusan, dan data statistik, juga dapat membuat Humas kesulitan dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada publik.

Koordinasi dan kerjasama menjadi faktor lain yang perlu diperhatikan (Silalahi et al., 2021). Kurangnya koordinasi antara Humas dengan unit kerja lain di DPRD dapat membuat informasi yang disampaikan tidak konsisten dan membingungkan publik. Selain itu, kurangnya kerjasama dengan media massa juga dapat membuat Humas kesulitan dalam menyebarkan informasi kepada publik yang lebih luas. Terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diadakan oleh Humas juga dapat menghambat upaya Humas dalam membangun hubungan yang baik dengan publik.

Di sisi lain, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi kemampuan Humas. Kondisi politik yang tidak stabil dapat membuat Humas kesulitan dalam menyampaikan informasi yang netral dan objektif. Rendahnya kepercayaan publik terhadap DPRD juga dapat membuat Humas kesulitan dalam mendapatkan perhatian dan kredibilitas publik. Misalnya, jika masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap institusi tersebut, mereka mungkin lebih skeptis terhadap pesan yang disampaikan oleh Bagian Humas. Selain itu, persaingan informasi dari berbagai sumber juga dapat membuat Humas kesulitan dalam menonjolkan informasi yang disampaikan oleh DPRD. Dalam era di mana informasi tersebar luas melalui berbagai platform media, memastikan bahwa pesan DPRD tidak terbenam dalam kebisingan informasi menjadi tantangan tersendiri bagi Humas. Dengan memperhatikan berbagai faktor ini, Bagian Humas DPRD Sumatera Utara dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam upaya mereka untuk menyampaikan informasi kepada publik secara efektif dan akurat. Hal ini mungkin melibatkan strategi komunikasi yang lebih proaktif, penggunaan narasi yang kuat untuk memperkuat pesan, dan meningkatkan kolaborasi dengan media massa dan platform digital untuk memastikan informasi DPRD diterima dengan baik oleh masyarakat.

SIMPULAN

Peran Humas pada Sekretariat DPRD Sumatera Utara memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga keterbukaan dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, Bagian Humas memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara DPRD dan masyarakat, serta sebagai penggerak dalam memperluas pemahaman dan partisipasi publik terhadap proses dan keputusan yang diambil oleh DPRD.

Peran Humas tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan pengelolaan citra dan reputasi lembaga, serta memfasilitasi dialog dan interaksi yang konstruktif antara DPRD dan masyarakat. Humas DPRD Sumatera Utara berperan dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui berbagai media, merespon pertanyaan dan keluhan masyarakat, mengelola media sosial resmi DPRD, dan menyelenggarakan berbagai acara untuk menjalin komunikasi dengan publik. Selain itu, Humas juga bertugas mempromosikan citra positif DPRD, melakukan edukasi kepada masyarakat, mendorong partisipasi publik dalam proses kebijakan, membangun hubungan internal yang harmonis, dan menyediakan informasi dan layanan kepada anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD.

Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat kemampuan Humas dalam mengkomunikasikan informasi di Bagian Humas DPRD Sumut. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya koordinasi dan kerjasama, serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi politik yang tidak stabil dan rendahnya kepercayaan publik terhadap DPRD. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu adanya upaya yang lebih serius

dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Humas, alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kerjasama dengan media massa, dan pembangunan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, I. F., Siregar, N. S. S., & Hartono, B. (2023). Kinerja Birokrasi Pelayanan Administrasi Kurikulum pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMP Negeri 6 Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2211–2223. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1580>
- Azhara, R. R. A., & Kartini, D. S. (2022). Peranan Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 pada Bidang Pendidikan di Indonesia. *Perspektif*, 11(4), 1432–1440. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7521>
- Bah, Y. M., Ridwan, M., Suharyanto, A., & Amal, B. K. (2020). Social Work Research. Medan: Biricu Publisher.
- Dea, S., Ginting, A., Suharyanto, A., & Batubara, B. M. (2022). Evaluasi Penyaluran Program Anggaran Dana Desa Di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinam Kabupaten Dairi. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 46–55. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1183>
- Hia, E. N., Siagian, M., & Achmad, N. (2021). Implementasi Family Development Session Program Keluarga Harapan. *Perspektif*, 10(1), 128–139. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4146>
- Hidayat, A., Kusmanto, H., & Ridho, H. (2022). Analisis Pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Covid-19. *Perspektif*, 11(3), 1105–1118. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6444>
- Husnifal, H., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). Kinerja Birokrasi Dalam Pemberian Reward dan Punishment Untuk Peningkatan Produktifitas Kerja Dan Pengembangan Karir Pegawai Pada Sekretariat DPRK Langsa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2546–2656. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1661>
- Hutapea, T. M. (2022). Analisis Model Attention - Interest - Search - Action - Share terhadap Akun Instagram @bodatnation sebagai Media Baru Pemasaran. *Perspektif*, 11(2), 751–761. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6435>
- Irfan, I., & M. tahir, M. tahir. (2020). Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 4(1), 37–48. <https://doi.org/10.33627/es.v4i1.410>
- Jannah, N., Muda, I., & Jamil, B. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area) Implementation of Education Family Pogram (PKH) Policy in The Field of Education (Case Study in the Urban Village of . *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(1), 8–15. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.774>
- Jatikusuma, D., & Hartono, B. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Provinsi Sumatera Utara The Effect of Implementing an Electronic-Based Government System on Increasing Employee Perf. 5(4), 3119–3129. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1770>
- Juru, N. A., & Gorda, E. S. (2021). Analisis Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. *Perspektif*, 10(1), 239–247. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4641>
- Kurniaty, E. Y. (2020). Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 227–234. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.280>
- Manik, N., Adam, A., & Isnaini, I. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Padang Bolak. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 675–684. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1274>
- Matondang, A. H., Hartono, B., & Harahap, D. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2391–2403. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1636>
- Nababan, R. A., Sihombing, M., & Thamrin, H. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 108. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10157>
- Pramaskara, T. E. (2022). Social Media Affordances: Instagram Content as a Means to Perpetuate Gender Stereotification. *Perspektif*, 11(3), 866–877. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6455>
- Rahayu, F., Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Berbasis Paperless pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3291–3305. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1683>

- Sianturi, I. B., Kadir, A., & Nasution, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Putus Sekolah di UPT. Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 1(1), 22-30. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.776>
- Silalahi, B. A., Sihombing, M., & Isnaini. (2021). Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr . RM . Djoelham Binjai Analysis of Implementation of The Financial Managem. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1) 2021: 1-13, 3(1), 1-13. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.518>
- Sugiyono, P. D. (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati, Harahap, R. H., & Isnaini. (2021). Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Management Of Public Government Administration In The Secretariat Of The Sumatera Utara Province DPRD. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 118-133. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.728>
- Syahputra, D. I., Hendra, Y., & Hidayat, T. W. (2019). Peran Humas Dalam Membangun Citra Pemerintahan Sumatera Utara Pada Kantor Biro Humas Gubernur. *Perspektif*, 7(1), 24. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i1.2523>